

RINGKASAN RKPD TAHUN 2021

1. RKPD Kabupaten/kota disusun berdasarkan kepada PMDN Nomor 86 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana dalam penyusunan mengacu kepada RPJMD maupun kepada RKPD Provinsi dan RKPP pemerintah serta dengan memperhatikan kebijakan daerah kabupaten/kota sekitar. Tahapan penyusunan RKPD dimulai pada Bulan Desember tahun N-2 dan paling lambat ditetapkan pada bulan Juni Tahun berikutnya, Adapun tahapan penyusunan RKPD dimulai dari Penyusunan Ranwal RKPD, Penyusunan Rancangan RKPD, Musrenbang RKPD, Penyusunan RA RKPD dan yang terakhir adalah penetapan RKPD. Kegunaan dokumen RKPD adalah sebagai pedoman perangkat daerah untuk Menyusun Renja PD, disamping untuk bahan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Penetapan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).
2. Dalam RKPD juga memuat kondisi umum daerah, seperti kondisi geografi , kondisi demografi, kondisi beberapa aspek daerah, dengan didukung oleh data yang paling up date, dengan tujuan untuk mengetahui sampai sejauhmana permasalahan daerah yang akan diselesaikan tahun berikutnya, disamping juga memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD tahun sebelumnya, berangkat dari permasalahan ini akan diketahui prioritas dan sasaran pembangunan sampai dengan identifikasi permasalahan persektor/urusan.
3. Dalam bab selanjutnya berisi proyeksi kondisi keuangan tahun perencanaan yang antara lain memuat proyeksi pendapatan, proyeksi belanja daerah dan proyeksi pembiayaan daerah. Proyeksi ini diharapkan mampu merespon permasalahan daerah yang tentunya setelah dilakukan analisis teknokratis harus memberikan dampak positif terhadap peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, yang tentunya dengan melihat prioritas dan sasaran pembangunan.
4. Prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD Tahun 2021 dibagi dalam beberapa bidang, yang mengacu pada RPJMD, dan diturunkan lagi menjadi pertahun antara lain terdiri dari prioritas dan sasaran Bidang Ekonomi, bidang Sosial Budaya dan bidang Infrastruktur , juga memuat keterkaitan dengan prioritas dan sasaran dengan RKPD pemerintah provinsi maupun dengan RKP pemerintah.

Berikut disampaikan indikator tujuan, sasaran RKPD tahun 2021.

**Indikator Tujuan dan Sasaran Tahun 2021 Berdasarkan Misi RPJMD Kabupaten
Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2016)	CAPAIAN TAHUN	KINERJA AKHIR
					2021	TAHUN 2022
1. Mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional dan produktif	Indeks Reformasi Birokrasi	1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Nilai SAKIP Kabupaten	CC	B	BB
			Opini BPK	WTP	WTP	WTP
			Tingkat Kematangan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	2	3	3
		2. Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	77,41	79,50	80
2. Meningkatkan kapasitas keuangan dan pembiayaan daerah	Persentase PAD/ Total Pendapatan Daerah (%)	3. Meningkatnya kapasitas fiskal/pembiayaan daerah	Pertumbuhan PAD (%)	1.529.120.844 (Rp)	18.88	22,15
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas	- Rata-rata lama sekolah (tahun) - Harapan Lama sekolah - Usia Harapan Hidup (tahun)	4. Meningkatnya jangkauan dan kualitas pendidikan	- Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	97.69	100	100
			- APM SMP/MTs/Paket B (%)	72.22	83.12	85.30
			- Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12	98.93	100	100
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15	88.98	99.14	100
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A (%)	108.72	100	100
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B (%)	89.28	97.73	99.42
			Angka Kelulusan SD/MI	100	100	100
			Angka Kelulusan SMP/MTs	100	100	100
		5. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	jumlah Kematian Ibu (orang)	4	2	1
			Angka Kematian Bayi (AKB)	21	17	16
			Prevalensi gizi buruk	5.3	5	4

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2016)	CAPAIAN TAHUN	KINERJA AKHIR
					2021	TAHUN 2022
		6. Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Aktif	8.21	26.48	31.05
		7. Meningkatnya Kesadaran masyarakat dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	64.48	64.84	64.89
			Rasio KDRT	0,017	0,012	0,011
			Tingkat Capaian Status Kabupaten Layak Anak	500	800	900
		8. Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1.39	1.31	1,29
4. Meningkatkan prestasi olahraga	Peringkat Kab. HSU di Tingkat Provinsi	9. Meningkatnya Prestasi Olahraga	Jumlah Cabang Olahraga yang mendapatkan medali di kejuaraan provinsi (cabang)	15	22	25
5. Memelihara kehidupan sosial dan keagamaan yang kondusif	Jumlah Kejadian berlatarbelakang konflik SARA	10. Terselenggaranya kehidupan sosial masyarakat yang kondusif dan agamis	Jumlah Kejadian berlatarbelakang konflik SARA	0	0	0
6. Meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat	1. Pendapatan Perkapita	11. Meningkatnya hasil-hasil produksi pertanian, Peternakan, dan Perikanan	Nilai PDRB Sektor Pertanian (Rp)	491,399.21	524.794,34	533.143,13
	2. Laju Pertumbuhan Ekonomi	12. Meningkatkan ketahanan pangan daerah	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita (Kg/Kapita/Th) :			
			-Total Energi (kkal)	4,824	3,592	3.633
			-Total Protein (gram)	146.84	87,43	88,43
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	79.00	82,00	83,00
		13. Berkembangnya peran ekonomi kreatif Industri Kecil Menengah (IKM) dan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM)	PDRB Sektor Industri Pengolahan	293.339,13	366.607,79	381.261,53
			PDRB Sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	386.837,86	513.694,04	539.065,27
		14. Meningkatnya Sektor Pariwisata	PAD sektor Pariwisata (Juta Rp)	165.45	173,00	175,00

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2016)	CAPAIAN TAHUN	KINERJA AKHIR
					2021	TAHUN 2022
		15. Menciptakan tenaga kerja produktif yang siap dan mampu diserap lapangan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3.14	2,10	2,10
		16. Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase penduduk miskin (%)	6.76	5,73	5,50
7. Meningkatkan daya dukung infrastruktur di daerah	Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar	17. Meningkatnya aksesibilitas/konektivitas wilayah	Persentase desa yang terhubung dengan sarana jalan dalam kondisi baik (%)	55,71	71,69	72,61
			Persentase desa yang terhubung dengan moda transportasi (%)	93,61	95,89	96,35
			Persentase wilayah yang terhubung dengan jaringan komunikasi (%)	39	60	65
		18. Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur pengairan	Luas sawah yang dapat diairi irigasi (ha)	6.050,00	6.450,00	6.500,00
		19. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar perumahan dan permukiman	Penduduk yang mengakses Air Bersih (%)	72.31	96,81	100
			Pengurangan kawasan Kumuh Perkotaan (%)	123,94 ha	48,57	100
			Penduduk yang memiliki sanitasi layak (%)	65.24	93,91	100
8. Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam/lahan yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	20. Pengurangan lokasi banjir	Penurunan titik banjir	199	174	169
			Persentase peruntukkan lahan yang sesuai dengan RTRW	99,71	99,95	99,95
		21. Meningkatnya kualitas dan kelestarian lingkungan	Indeks Kualitas Udara	74,66	70,00	69,00
			Indeks Kualitas Air	43	45	45

5. Pada bab berikutnya disampaikan Rencana Kerja dan Pendanaan daerah yang berisi pagu indikatif masing-masing SKPD dalam rangka merespon tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan berdasarkan permasalahan yang muncul, untuk semua bidang urusan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh SKPD. Adapun kebijakan belanja daerah untuk SKPD ditekankan pada belanja wajib seperti belanja mengikat, pelayanan SPM, mandatory spending, maupun belanja sesuai dengan urusan yang menjadi tanggungjawabnya. Uraian belanja

yang ada pada RKPD meliputi program sampai dengan kegiatan dan sifatnya masih gelondongan.

6. Pada bab berikutnya disampaikan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah atau yang biasanya disebut kinerja makro daerah, yang terdiri dari kinerja sabagi hasil dari pencapaian outcome berapa program SKPD, inilah salah satu kontrak kinerja pemerintah daerah pertahun yang menjadi acuan untuk dipedomani oleh setiap SKPD yang terdiri dari 13 indikator.

**Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 – 2022**

No.	Indikator	Target Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5.45	5.70	5.95	5.00	6.00
2	Pendapatan Perkapita	18,283,500	19,537,750	20,792,000	21,800,000	23,300,500
3	Usia Harapan Hidup (tahun)	63.07	63.25	63.43	63.55	63.79
4	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	7.18	7.30	7.43	7.55	7.55
5	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	80,50	81	81,5	82	83
6	Pertumbuhan Indusri Kecil Menengah (%)	7,28	7,30	7,32	7,35	7,35
7	Persentase penduduk miskin (%)	6.42	6.19	5.96	7,00	5.50
8	Persentase desa yang terhubung dengan sarana jalan dalam kondisi baik (%)	67,12	68,95	70,32	71,69	72,61
9	Persentase desa yang terhubung dengan moda transportasi (%)	94,52	94,98	95,43	95,89	96,35
10	Luas sawah yang dapat diairi irigasi (Ha)	6.150,00	6.250,00	6.350,00	6.450,00	6.500,00
11	Penduduk yang mengakses Air bersih (%)	82.26	86.32	90.84	96.81	100
12	Penduduk yang mempunyai sanitasi layak (%)	70.50	79.39	85.72	93.91	100
13	Indeks Kualitas Air	45	45	45	45	45

Demikian Ringkasan RKPD dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana perlunya.